

Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Tingkat Kemiskinan Pada Provinsi Kalimantan Barat

Maria Meilania Winda^a

^aMagister Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura, Pontianak
Email: B2042202013@student.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Tingkat kemiskinan pada Kab/kota Provinsi Kalimantan Barat. Kinerja keuangan diukur menggunakan indikator Rasio Kemandirian, Rasio Desentralisasi, Rasio Efisiensi. Untuk metode penelitian menggunakan analisis data panel cross section dan time series. Object Penelitian Yaitu 14 Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Barat dengan rentang waktu peneliti selama 6 tahun dari tahun 2015 sampai dengan 2020. Model uji penelitian yang dipilih menggunakan Random Effect Model dengan hasil yang mengindikasikan bahwa kinerja keuangan daerah di berbagai kota/kabupaten di Kalimantan Barat tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan baik secara simultan maupun parsial.

Kata Kunci: Rasio Kemandirian, Rasio Desentralisasi, Rasio Efisiensi, Tingkat Kemiskinan

PENDAHULUAN

Kebijakan Otonomi daerah diatur pada UU No 32 tahun 2004 yang digantikan oleh UU no 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dimana dalam kebijakan tersebut pemerintah daerah mengurus wilayahnya mempunyai wewenang dalam mengelola dan mengatur sumber daya sesuai dengan kemampuannya. Pemerintah daerah di haruskan menyusun laporan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerahnya dan laporan tersebut menjadi salah satu sumber informasi untuk evaluasi kinerja pemerintahan daerahnya.

Kebijakan Otonomi daerah diterapkan karena pemerintah pusat tidak mampu mengawasi keseluruhan pembangunan daerah sehingga melimpahkan kewenangan tersebut kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus secara mandiri kepentingan didaerahnya (Rosemarry et al. 2016). Pemerintah daerah sebagai pengelola keuangan daerah mempunyai peran penting dalam meningkatkan menghasilkan sumber-sumber keuangan agar dapat meminimalkan terjadinya penurunan pendapatan setiap tahun. Oleh sebab itu Pengukuran kinerja keuangan daerah sangat penting untuk dilakukan

Indikator yang sering digunakan untuk menilai baik dan buruknya pengelolaan keuangan pemerintah daerah menurut Raharja et al.2017 dapat menggunakan Kinerja Keuangan Daerah. Dengan mengukur Kinerja keuangan, pemerintah dapat menggali potensi-potensi yang dimiliki daerahnya sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan daerah setiap tahunnya. Kinerja keuangan daerah yang positif seharusnya dapat berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan termasuk penurunan tingkat kemiskinan disuatu daerah (Asmara,

2014) namun dengan adanya penerapannya otonomi daerah belum menunjukkan perbaikan kinerja di beberapa daerah. hal ini mungkin diindikasikan melalui peningkatan dana transfer dari Pemerintah Pusat ke Daerah. secara drastis namun tidak membuat jumlah dan presentase masyarakat miskin menurun secara tepat (Nursini.2019).

Kalimantan Barat merupakan provinsi terluas urutan ke empat di Indonesia, namun memiliki tingkat kemiskinan yang paling tinggi di pulau Kalimantan (BPS 2022). Berdasarkan Berita resmi statistik mengenai Profil Kemiskinan Kalimantan Barat Maret 2021 didapatkan bahwa jumlah penduduk miskin di Kalimantan Barat mencapai 367,89 ribu orang (7,15%). Kenyataan tersebut dapat menjadi indikasi adanya permasalahan dalam kinerja keuangan daerah di Provinsi Kalimantan Barat, sehingga perlu dianalisis dengan melihat dampaknya terhadap penurunan tingkat kemiskinan di wilayah provinsi tersebut. Berikut adalah perkembangan tingkat kemiskinan Kalimantan barat selama 10 tahun.

Gambar : 1
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin 2010-2021



Sumber: Diolah dari data Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Penelitian tentang kinerja keuangan terhadap kemiskinan telah dilakukan para peneliti sebelumnya. Hasil dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah kabupaten/kota di provinsi Bali (Dwiranda, et al. 2014), Jawa Tengah (Febiani et al. 2016), Sulawesi Utara (Pantas et al., 2019), Jawa Timur (Lucky, 2013), Banten (Asmara et al 2014) dan seluruh provinsi di Indonesia (Nursini, et al. 2019) berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Namun Mizkan et al. 2015 yang melakukan penelitian terhadap kota pekanbaru tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Berdasarkan konteks tersebut dan sepengetahuan penulis belum ada yang meneliti kinerja keuangan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat. Untuk itu penulis berkeinginan meneliti apakah ada pengaruh Kinerja Keuangan terhadap tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat.

KAJIAN LITERATUR

Teori Keagenan atau agency theory menurut Jensen dan Meckling (1976) yaitu suatu hubungan atau kontrak antara satu orang atau lebih (principals) yang melibatkan orang lain (agents) dan karakteristik utama hubungan keagenan terletak pada kontrak pelimpahan wewenang dan tanggungjawab prinsipal kepada agen. Dalam sisi aturan formal entitas pemerintahan dijalankan dengan mengacu pada aturan berdasarkan spesifikasi tugas, wewenang, tanggungjawab serta partisipan yang cara kerja dan mekanisme hubungannya berbeda antar pemerintah dan korporasi. Dengan adanya ikatan formal menunjukkan bahwa kontrak dalam organisasi pemerintahan di Indonesia memberikan justifikasi bahwa terdapat hubungan keagenan dalam organisasi pemerintahan di Indonesia.

Mengacu pada UU no 32 tahun 2004 selanjutnya diganti dengan UU no 23 tahun 2014 partisipan dalam organisasi pemerintahan meliputi rakyat, bupati atau walikota, dan DPRD. Bupati dan Walikota dipilih oleh rakyat dan bertanggungjawab atas perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban program pemerintah. Mekanisme pemilihan ini adalah pelimpahan wewenang dari rakyat kepada Bupati atau Walikota. Oleh sebab itu pemberian otoritas eksekutif dan pelimpahan wewenang kepada Bupati atau Walikota menunjukkan bahwa Bupati atau Walikota berperan sebagai agent dan rakyat berperan sebagai principal

Adanya perbedaan kepentingan serta kepemilikan dan pengendalian yang terpisah dalam suatu organisasi antara agent dan principal dapat menimbulkan konflik keagenan. Konflik keagenan tersebut dapat menyulitkan atau menghambat kinerja yang positif bagi perusahaan itu sendiri maupun stakeholders (Putra, 2012). Agency theory membahas tentang hubungan keagenan dimana principal mendelegasikan pekerjaan kepada agent yang melakukan pekerjaan

Salah satu bukti campur tangan pemerintah pusat adalah dengan memberikan bantuan dana perimbangan yang bertujuan untuk membantu mendanai kebutuhan daerah dengan harapan daerah tersebut bisa mandiri dalam menghasilkan pendapatan asli daerahnya dimasa yang akan datang. Adanya tujuan yang berbeda antara principal dan agent menimbulkan masalah dalam keagenan maka agency teori berusaha menjawab permasalahan diantara pihak yang bekerja sama yang memiliki tujuan dan pembagian pekerjaan yang berbeda sesuai dengan pernyataan Fama dan Jensen (1983) yang mengatakan bahwa fungsi manajemen dan fungsi pengawasan dipisahkan oleh sistem pengambilan keputusan.

Kebijakan Otonomi daerah diterapkan karena pemerintah pusat tidak mampu mengawasi keseluruhan pembangunan daerah sehingga melimpahkan kewenangan tersebut kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus secara mandiri kepentingan didaerahnya (Rosemarry et al. 2016). Dengan adanya penerapan kebijakan otonomi diharapkan daerah mampu menggali potensi yang dimiliki sehingga akan berpengaruh terhadap kualitas dan lingkup pelayanan masyarakatnya (Halaskova, 2016). Hal ini sesuai dengan pernyataan Widjaja, 2002 yang mengatakan dengan adanya otonomi daerah diharapkan pemerintah daerah akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan pemerintah pusat diharapkan tidak

terlalu aktif dalam mengatur kegiatan daerah. Dengan melakukan identifikasi potensi sumber pendapatan daerah diharapkan pemerintah daerah juga mampu menetapkan belanja daerah yang secara ekonomi dan wajar serta efisien dan efektif sehingga nantinya dapat dipergunakan untuk pembangunan daerah.

Pengukuran kinerja (performance measurement) merupakan suatu proses penilaian kemajuan sebuah pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, seperti : efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa yang dihasilkan (seberapa baik barang dan jasa dan seberapa puas pelanggan), hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan, dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuannya. (Robertson, 2002 dalam Mahsun, 2006 : 25).

Menurut Junarwati et al. (2013), kinerja keuangan daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja keuangan daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundangan selama satu periode anggaran. Pengukuran kinerja keuangan daerah dapat menggunakan beberapa rasio, yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi dan rasio pertumbuhan pendapatan. Rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan ketergantungan daerah terhadap pendapatan transfer (sumber dana ekstern). Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah menandakan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah, demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian keuangan daerah juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi. Rasio efektivitas merupakan kemampuan pemerintahan daerah dalam merealisasikan PAD yang telah direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan realisasi pengeluaran (belanja) dengan realisasi penerimaan daerah. Rasio pertumbuhan pendapatan berfungsi dalam mengukur sejauhmana kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan serta meningkatkan keberhasilannya dari tahun ke tahun (Halim, 2007).

Berkaitan dengan konsep kemiskinan, definisinya sangat beragam, mulai dari ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar hingga definisi kemiskinan dengan mempertimbangkan komponen sosial dan budaya. Kemiskinan seringkali dipahami dalam pengertian yang sangat sederhana yaitu sebagai keadaan kekurangan uang, rendahnya tingkat pendapatan dan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar hidup sehari-hari. Padahal sebenarnya, kemiskinan adalah masalah yang sangat kompleks, baik dari faktor penyebab maupun dampak yang ditimbulkannya. Kemiskinan sebagai suatu ketidakcukupan atau kekurangan terhadap aset-aset penting dan peluang-peluang yang menjadi hak setiap manusia. Kemiskinan dinyatakan sebagai tidak adanya kesempatan meraih kesejahteraan, yang diukur

berdasarkan kekayaan yang dimiliki seseorang, kesehatan, gizi, pendidikan, aset, perumahan dan hak-hak tertentu dalam masyarakat seperti kebebasan menyampaikan pendapat (World Bank, 2014; Taufiq, 2017)

BPS mendefinisikan bahwa konsep kemiskinan mengacu pada konsep ekonomi, dimana kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang dialami seseorang berdasarkan pada pengeluaran per kapitanya selama sebulan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan standar minimum yang di representasikan oleh garis kemiskinan (GK) yaitu batas minimum pengeluaran per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan

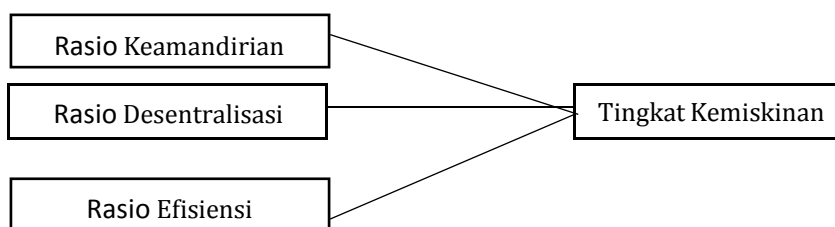
Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar, karena menyangkut pemenuhan kebutuhan yang paling mendasar dalam kehidupan. Dan kemiskinan merupakan masalah global karena kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi banyak negara. Kemiskinan juga merupakan problema kemanusiaan yang menghambat kesejahteraan dan peradapan, sehingga semua orang sepakat bahwa kemiskinan harus ditanggulangi. Strategi penanggulangan kemiskinan berhubungan dengan tersedianya data kemiskinan yang akurat, supaya kebijakan yang dilakukan pemerintah menjadi tepat sasaran.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berbasis pada penelitian deskriptif dan eksplanatory. Deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan objek yang diteliti (Ruslan, 2006: 12). Eksplanatory yaitu penelitian yang menguji hubungan antar variabel, yang bermaksud untuk menguji dan menjelaskan hubungan antar variabel bebas (exogen variable) dan variabel terikat (endogen variable) (Ruslan, 2006:15). Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) variabel yang akan diteliti yaitu : Kinerja Keuangan Daerah dan tingkat kemiskinan. Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang berasal dari BPS dan Djpk Kemterian Keuangan, yang merupakan data gabungan antara time series (tahun 2015 - tahun 2020, selama 6 (enam) tahun dengan cross section 14 (empat belas) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat.

Berikut kerangka konseptual dalam penelitian ini:

Gambar : 2 Kerangka Konseptual



Analisis Panel Data

Guarati (2013) data panel merupakan gabungan antara data cross section dan datatime series. Data cross section adalah data yang terdiri dari atas satu atau lebih variabel yang dikumpulkan pada waktu yang sama, sedangkan data time series adalah sebuah kumpulan observasi terhadap nilai – nilai sebuah variabel dari beberapa periode waktu yang berbeda. Keuntungan mengkombinasikan data cross section dan time series yaitu data yang diterima lebih informatif, variative, mengurangi kolinearitas antar variabel, derajat kebebasan yang lebih banyak dan efisien. Terdapat tiga tehnik pendekatan mendasar yang digunakan untuk menganalisis data panel (Mirza.2012:) :

1. Common Effect Model (CEM)

Model ini dikenal dengan tehnik regresi yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel dengan cara hanya mengkombinasikan data time series dan data cross section. Model ini hanya menggabungkan kedua data tersebut tanpa melihat perbedaan antar waktu dan individu sehingga dapat dikatakan bahwa model ini sama dengan Metode Ordinary Least Square (OLS) karena menggunakan kuadrat kecil biasa. Model ini merupakan pendekatan yang paling sederhana karena hanya mengkombinasikan data time series dan cross section dengan mengasumsikan data gabungan menunjukkan kondisi sesungguhnya dari masing-masing variabel. Pada beberapa penelitian data panel, model ini seringkali tidak digunakan sebagai estimasi utama karena sifat dari model ini yang tidak membedakan perilaku data sehingga memungkinkan terjadinya bias, namun model ini digunakan sebagai pembanding dari kedua pemilihan model lainnya.

2. Fixed Effect Model (FEM)

Pendekatan model ini menggunakan variabel boneka yang dikenal dengan sebutan model efek tetap atau Least Square Dummy Variabel (LSDV) atau sering disebut juga Covariance Model. Pada metode ini estimasi dapat dilakukan dengan tanpa pembobot atau Least Square Dummy Variable (LSDV) dan dengan pembobot (cross section weight) atau General Least Square (GLS). Tujuan dilakukannya pembobotan adalah untuk mengurangi heterogenitas antar unit cross section. Penggunaan model ini tepat untuk melihat perubahan perilaku data dari masing-masing variabel sehingga data lebih dinamis dalam menginterpretasikan data.

3. Random Effect Model (REM)

Widarjono, 2005 mengatakan dalam metode Random Effect Model (REM) mengestimasi data panel mungkin adanya gangguan yang saling berhubungan antar individu dan waktu. Model dengan pendekatan ini yaitu model efek acak yang parameter-parameternya berbeda antar daerah maupun antar waktu yang dimasukkan dalam error.

Pemilihan model Common effect dan Fixed Effect dapat dilakukan dengan pengujian Like Hood Test Ratio dengan ketentuan apabila nilai probabilitas yang dihasilkan signifikan dengan alpha maka dapat diambil keputusan menggunakan Fixed Effect Model.

Pemilihan Metode Data Panel

1. Uji Chow
Uji chow digunakan untuk menentukan model terbaik antara fixed effect model dengan Common/Pooled Effect. Apabila hasil:
Ho= Pilih Common Effect H1= Pilih Fixed Effect
2. Uji Hausman
Uji Hausman digunakan untuk menentukan model Fixed Effect atau Random Effect.
Apabila hasil:
Ho= Pilih Random Effect H1= Pilih Fixed Effect
3. Uji Langrange

Untuk mengetahui apakah Random Effect Model lebih baik dari Common Effect Model. Apabila hasil:

Ho= Pilih Common Effect H1= Pilih Random Effect

Hubungan antara Kinerja Keuangan Daerah dengan Kemiskinan dapat di analisis dengan menggunakan model persamaan :

$$POV_{it} = b_0 + b_1 \text{Kemit} + b_2 \text{Desit} + b_3 \text{Efiit} + e$$

| | |
|------------|-------------------------------|
| POV it | : Kemiskinan |
| b0 | : konstanta |
| b1, b2,... | : koefisien regresi |
| Kemit | : Rasio Kemandirian |
| Desit | : Rasio Desentralisasi |
| Efiit | : Rasio Efisiensi |
| e | : variabel pengganggu (error) |

Uji Statistik

Uji Statistik dilakukan untuk mengetahui besarnya masing – masing koefisien dari variabel – variabel bebas baik secara bersama – sama maupun secara parsial terhadap variabel terikat yaitu dengan menggunakan uji secara serentak (Uji F), Uji Parsial (Uji t) dan Adjusted R-Squared (Adj R²)

Uji Asumsi Klasik

Untuk memperjelas dan memperkuat pengaruh dari hasil analisis regresi yang diperoleh maka digunakan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik terdiri atas normalitas, multikolinieritas dan autokorelasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian pertama adalah memilih antara model common effect dengan fixed effect melalui penggunaan uji chow. Hasil perhitungan statistik pada model ini menunjukkan probabilitas cross-section Chisquare sebesar 0,00, atau kurang dari tingkat signifikansi sebesar 5 persen. Hal tersebut mengindikasikan menolak H₀, yang berarti model yang terbaik dari kedua model di atas adalah model fixed effect (Tabel 1). Pengujian model regresi data panel selanjutnya melakukan pemilihan model terbaik antara model fixed effect dan random effect dengan penggunaan Hausman test. Hasil perhitungan statistik menunjukkan probabilitas cross-section random sebesar 0,5701 atau lebih dari tingkat signifikansi sebesar 5 persen. Hal ini mengindikasikan tidak dapat menolak H₀, sehingga model terbaik dari kedua model tersebut adalah model random effect.

Tahap pengujian model regresi data panel selanjutnya melakukan pemilihan kembali model terbaik antara model random effect dan common effect model dengan melakukan uji Lagrange Multiplier (LM) test. Hasil perhitungan statistik dengan nilai both sebesar 0.0000 kurang dari 0,05. Hal ini mengindikasikan menolak H₀, sehingga model terbaik dari kedua model tersebut adalah model random effect. Dengan demikian, untuk memecahkan masalah penelitian dalam studi ini menggunakan model random effect. Berikut adalah table pemilihan model terbaik:

Tabel :1 Pemilihan Model terbaik

| Tahap | Pengujian Model | Metode Pengujian | Hasil | Keterangan |
|-------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Fixed effect vs common effect | Chow test | Nilai probabilitas Cross section Chi-square = 0,00 < 0,05 | Tolak H ₀ , model yang terbaik adalah fixed effect |
| 2 | Fixed effect vs random effect | Hausman test | Nilai probabilitas Cross section random = 0,5701 > 0,05 | Tidak dapat tolak H ₀ , model yang terbaik adalah random effect |
| 3 | Random effect vs commoneffect | Lagrange Multipliertest | Nilai both 0,000 < 0,05 | Menolak Ho. Model yang terbaik adalah Random effect model |

Sumber: Data diolah dengan pengujian model dilakukan secara berurutan sesuai tahap

Penggunaan model random effect membuat pengujian asumsi klasik dalam penelitian ini menjadi tidak relevan lagi. Dalam estimasi data panel, uji asumsi klasik yang penting untuk dilakukan adalah multikolinieritas dan heteroskedastisitas. Oleh karena random effect menggunakan teknik estimasi Generalized Least Squares (GLS), maka teknik estimasi tersebut menjadi salah satu cara untuk mengatasi masalah heteroskedastisitas (Ekananda, 2016), sehingga pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini tidak dilakukan. Begitu pula dengan pengujian multikolinearitas, hal ini didasarkan Verbeek (2000) dan Gujarati (2006) bahwa pengujian asumsi klasik dalam model data panel tidak harus dilakukan.

Pemilihan model random effect untuk melakukan uji F didapatkan bahwa

variabel independent yaitu Rasio Kemandirian, rasio desentralisasi dan rasio efisiensi secara simultan tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini bisa dilihat dari nilai F statistic $0,517699 < 2,7187850$ F table. Dan prob F-statistik sebesar 0,671291 lebih besar dari α sebesar 0,05. Kesimpulan pada uji t didapatkan bahwa secara parsial kinerja keuangan baik dari rasio kemandirian, desentralisasi dan efisiensi tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Nilai Adjusted R Squared menunjukkan bahwa variasi perubahan naik turunnya tingkat kemiskinan dapat dijelaskan oleh Rasio Kemandirian, Rasio desentralisasi, dan Rasio efisiensi sebesar 1,7% sementara sisanya 8,3% dijelaskan oleh variable-variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Tabel 2: Jumlah Penduduk Miskin menurut Daerah

| Kota/Kab | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | jumlah | rata-rata |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-----------|
| Kab.Sambas | 49.29 | 44.88 | 45.42 | 45.48 | 43.84 | 41.41 | 270.32 | 45.05 |
| Kab.Bengkayang | 16.49 | 18.04 | 18.48 | 17.94 | 17.69 | 17.11 | 105.75 | 17.63 |
| Kab.Landak | 48.46 | 44.55 | 44.82 | 43.73 | 43.16 | 42.36 | 267.08 | 44.51 |
| Kab. Mempawah | 13.88 | 14.61 | 15.3 | 14.61 | 14.02 | 13.18 | 85.6 | 14.27 |
| Kab. Sanggau | 20.26 | 20.27 | 20.62 | 21.59 | 21.41 | 21.16 | 125.31 | 20.885 |
| Kab. Ketapang | 55.39 | 53.07 | 54.28 | 54.86 | 53.84 | 53.45 | 324.89 | 54.15 |
| Kab. Sintang | 36.83 | 40.36 | 41.46 | 42.65 | 40.3 | 39.19 | 240.79 | 40.13 |
| Kab. Kapuas Hulu | 23.74 | 24.49 | 23.96 | 24.76 | 25.22 | 23.93 | 146.1 | 24.35 |
| Kab. Sekadau | 12.56 | 11.97 | 12.74 | 12.29 | 12.28 | 11.92 | 73.76 | 12.29 |
| Kab. Melawi | 24.56 | 25.05 | 25.28 | 26.24 | 25.71 | 25.34 | 152.18 | 25.36 |
| Kab.Kayong Utara | 10.41 | 10.89 | 10.75 | 11.13 | 11.21 | 10.9 | 65.29 | 10.88 |
| Kab. Kubu Raya | 23.38 | 27.83 | 29.53 | 28.86 | 27.37 | 25.9 | 162.87 | 27.15 |
| Kota Pontianak | 31.56 | 34.13 | 33.18 | 31.76 | 31.46 | 30.7 | 192.79 | 32.13 |
| Kota Singkawang | 11.9 | 11.21 | 11.61 | 11.17 | 10.9 | 10.3 | 67.09 | 11.18 |

Berdasarkan data diatas didapatkan bahwa ketapang memiliki jumlah penduduk miskin paling tinggi dengan rata-rata 54,15 disusul oleh Kabupaten Sambas dengan rata-rata 45,05 dan Kabupaten Landak dengan rata-rata 44,51. Sedangkan kota Singkawang memiliki jumlah penduduk miskin paling rendah dengan rata-rata 11,18.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat kita ketahui bahwa Kinerja Keuangan Daerah yang di hitung dengan rasio kemandirian, rasio desentralisasi dan rasio efisiensi didapatkan secara simultan dan parsial tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan di kota maupun kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat dalam kurun waktu 6 tahun dari 2014 sampai dengan 2020.

Rasio kemandirian keuangan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan hasil yang sangat rendah karena 13 kabupaten/kota berada dibawah 25% sedangkan Kota Pontianak menjadi satu-satunya yang memiliki kemandirian keuangan dengan klasifikasi rendah dengan rata-rata 36,5%

Rasio Desentralisasi kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat 13 kabupaten/kota menunjukkan hasil yang sangat kurang dan kurang sedangkan Kota Pontianak berada pada kategori sedang.

Rasio efisien kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat 14 kota/kabupaten menunjukkan hasil dengan rata-rata tidak efisien

Tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat dari tahun 2014-2020 terus berfluktuasi baik dari sisi jumlah maupun persentasenya. Jika dilihat rata-ratanya Kabupaten ketapang memiliki jumlah penduduk paling tinggi sedangkan penduduk miskin yang paling rendah yaitu pada kota Singkawang.

Perubahan jumlah dan persentase penduduk miskin tidak akan terlepas dari perubahan nilai garis kemiskinan. Garis kemiskinan (GK) merupakan rata-rata pengeluaran per kapita perbulan yang digunakan untuk mengklasifikasikan penduduk ke dalam golongan miskin atau tidak miskin.

Saran untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengumpulkan informasi dari pemerintah daerah yang bersangkutan bila mana terdapat rasio keuangan yang baik namun belum mampu mengentaskan kemiskinan di daerahnya. dan sebaiknya menambah atau menggunakan variabel lain yang lebih relevan dengan tingkat kemiskinan pada sebuah daerah.

REFERENSI

Asmara, A. & Suci, S.C. 2014. *Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Banten*. Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah, 6(1), 41-53.

Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. www.bps.go.id

Badan Pusat Statistik. 2021. Berita Remi Statistik Profil Kemiskinan Kalimantan Barat Maret 2021.No.38/07/61/Th XXIV.

Ekananda, M. 2016. Analisis Ekonometrika Data Panel. Jakarta (ID): Mitra Wacana Media.

Febiandani, R., & Suseno, D.A. 2016. *Analisis Hubungan Kemandirian Keuangan Daerah dan Ketergantungan Daerah Terhadap Pengangguran dan Kemiskinan*. Economics Development Analysis Journal, 5(2), 217- 225.

Ghozali, Imam. 2016. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23.

Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Gujarati, D. 2006. Dasar-Dasar Ekonometrika. Jakarta (ID): Erlangga

Halim, Abdul. 2001. Bunga Rampai: *Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. Yogyakarta: UPP AMP YKPN

Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat

Junarwati, Basri, H., & Abdullah, S. 2013. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2010-*

2012. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*,
- Jensen, M dan W.Meckling.1976. *Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency and Ownership Structure*, *Journal of Financial Economics*
- Mizkan, H., Kamaliah, & Agusti, R. 2015. *Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengaruhnya terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Pekanbaru*. *Sorot: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial*, 10(1), 114- 130.
- Nana Putri Ani, N.L., & Dwirandra, A.A.N.B. 2014. *Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah pada Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan Kabupaten dan Kota*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 6(3), 481-497.
- Nursini, N. & Tawakkal. 2019. *Poverty Alleviation in the Context of Fiscal Decentralization in Indonesia*. *Economics and Sociology*, 12(1), 270-285.
- Raharja, A.K.Y., Suharno, & Harimurti, F. 2017. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan terhadap Kinerja Keuangan Daerah (Studi Kasus di Wilayah Soloraya Periode 2013 -2015)*. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, 13, 198-204.
- Rosemary., Chinyeaka Justine., dan Barisua Barry. (2016). *Local Government Financial Autonomy: A Comparative Analysis of Nigeria and Brazil*. *Arabian Journal OF Bussiness and Management Review (OMAN Chapter)*
- Taufiq, N. 2017. *Pengaruh Dinamika Sektor Pekerjaan terhadap Dinamika Kemiskinan di Indonesia*. *Sosio Konsepsia*.
- Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang No 15 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013
- Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Widarjono, A. (2005). *Ekonometrika: Teori dan Aplikasi untuk Ekonomi dan Bisnis* (edisi pertama). Yogyakarta: Ekonisia